

KOLABORASI MULTI AKTOR DALAM PENGELOLAAN WISATA GEO PARK BELITUNG

Bambang Pujiyono

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur Jakarta

Email: bambang.pujiono@budiluhur.ac.id

Received: 17 Mei 2022 | Revised: 18 Juni 2022 | Accepted: 20 Juni 2022

Abstract: This study aims to describe the collaboration of multi-actor in managing tourism GeoPark Belitung. This tourism management has succeeded in bringing the Belitung GeoPark into the UNESCO assessment as one of the international tourism destinations. Various actors, both from the government, private sector, and community, have contributed greatly. Contributions are given in accordance with the roles and functions. Each institution cooperates, communicates, and coordinates so as to build good collaboration. This research uses a qualitative approach, aiming to explain the phenomenon of GeoPark tourism management even in the pandemic era. The research lasted for 2 months from November to December 2020. There were 10 research resource persons from government, private and community elements who represented the institution. The research results provide in-depth information on successful collaborative practices. The results of this study provide a conceptual contribution to multi-actor collaboration in the field of tourism management.

Keywords: multi-actor collaboration; tourism; Geo Park Belitung

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan kolaborasi multi actor dalam mengelola pariwisata GeoPark Belitung. Pengelolaan pariwisata ini berhasil mengantarkan GeoPark Belitung masuk dalam penilaian UNESCO sebagai salah satu destinasi pariwisata internasional. Berbagai actor baik dari unsur pemerintah, swasta, dan komunitas memiliki kontribusi yang besar. Kontribusi yang diberikan sesuai dengan peran dan fungsi. Tiap lembaga melakukan kerjasama, komunikasi, dan koordinasi sehingga membangun kolaborasi yang baik.. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bertujuan mengeksplanasi fenomena pengelolaan pariwisata GeoPark meskipun di era pandemi. Penelitian berlangsung selama 2 bulan dari Nopember sampai dengan Desember 2020. Nara sumber penelitian dari unsur pemerintah, swasta, dan komunitas sebanyak 10 orang yang merepresentasi lembaganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata geopark dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tiap lembaga memiliki sekaligus melaksanakan otoritas dan perannya. Secara umum ketiga lembaga tersebut memiliki kesamaan komitmen untuk menjaga pelesatarian Geopark. Tiap lembaga memiliki kepentingan, pengaruh, dan kekuatan. Secara komparatif, lembaga pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata memiliki dominansi dibandingkan lembaga swasta dan komunitas yang ada. Hasil penelitian ini sekaligus menggambarkan kolaborasi multiaktor yang berhasil.

Kata kunci : kolaborasi multi aktor; pariwisata; Geo Park Belitung

PENDAHULUAN

Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi wisata Geo Park yang memiliki prospek untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat melalui kunjungan destinasi wisata. Geopark sebagai suatu kesatuan wilayah geografis yang di dalamnya terdapat situs-situs dan bentang alam dengan nilai signifikansi geologis bertaraf internasional yang dikelola berdasarkan konsep perlindungan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan.

Geopark tidak hanya menggambarkan keragaman geologi. Geopark menggali dan mengembangkan keterkaitan antara keragaman geologi yang dimiliki dengan sumber daya alam dan budaya. Pengembangan keterpaduan keragaman geologi, sumber daya alam, dan budaya dalam konsep geopark ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap bagaimana sejarah pembentukan bumi selama 4.600 juta tahun membentuk setiap aspek kehidupan dan sosial masyarakat. Aspek sosial dan kehidupan masyarakat yang dibentuk berupa kebanggaan bahwa daerahnya memiliki potensi destinasi pariwisata berkelas dunia. Eksistensi potensi wisata ini dapat mendorong pembangunan berbasis geosities yang memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kawasan wisata geopark dapat menciptakan peluang bisnis tingkat local. Manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat ini harus dibarengi dengan kesadaran untuk tetap menjaga kelangsungan hidup objek wisata yang ada. Keseimbangan kegiatan ekonomi dan konservasi lingkungan harus menjadi komitmen bersama setiap pelaku ekonomi local.

Pengelolaan pariwisata GeoPark Belitung tetap survive dalam konteks konservasi objek wisata dan tetap menjadi pilihan destinasi wisata berskala internasional. Keberadaan GeoPark bernilai strategis karena potensi Geopark Belitung didukung oleh penetapan wilayah Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Oleh karenanya, semua upaya pengembangan destinasi di kawasan Geopark Belitung harus menjadi kesatuan pembangunan kepariwisataan berbasis konservasi maupun edukasi di Belitung

Eksplorasi potensi pariwisata berdampak pada kompleksitas pengelolaannya, lebih khusus objek wisata berbasis alam. Wisata berbasis alam memiliki dua sisi yang bertentangan. Di satu sisi, alam menyediakan estetika sebagai tujuan destinasi wisata. Di sisi lain, kerusakan lingkungan alam juga terjadi karena eksplorasi wisata tersebut. Dalam kondisi demikian, muncul satu kearifan dalam pengelolaan pariwisata tetap mengutamakan keberlanjutan. Beberapa decade terakhir, konsep pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan menjadi tema yang sangat menarik untuk diskusi dan penelitian.

Dengan demikian, kajian tentang tata kelola pariwisata menjadi sangat penting untuk mendapatkan pengetahuan tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan (Bramwell & Lane, 2011). Pengelolaan pariwisata memerlukan kemitraan untuk mengetahui kerjasama dan koordinasi dalam merencanakan pariwisata berskala nasional, regional, dan local (Araujo & Bramwell, 2002). Pendekatan kolaboratif untuk mengelola pariwisata menjadi penting. Governansi yang kolaboratif diyakini efektif untuk mempromosikan kewirausahaan berkontribusi positif pada pembangunan sosial ekonomi masyarakat pedesaan pinggiran, dan memecahkan masalah komunitas setempat (Parhad Keyim, 2012; Keyim, 2015; Keyim, 2016; Keyim & Adamiak, 2014).

TINJAUAN LITERATUR

Pendekatan Kolaboratif dalam Pariwisata

Berdasar telaah pustaka ditemukan tiga unsur penting untuk mengkonstruksi kolaborasi dalam pariwisata. Ketiga unsur tersebut terdiri dari objek wisata, aktivitas terkait wisata, dan keterlibatan berbagai actor dalam pariwisata. Uraian konseptual berikut mencoba menjelaskan keterkaitan antara ketiga unsur tersebut menjadi konsep kolaborasi pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

Awalnya objek wisata dipandang sebagai sector privat, hanya orang yang berdaya ekonomi yang membutuhkan. Dalam perkembangannya, objek wisata menjadi kebutuhan publik. Pergeseran objek wisata dari barang privat menjadi barang public ini dapat diamati dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti. Objek wisata yang merujuk pada lokasi menghadirkan konsep bahwa wisata identik dengan studi tentang pedesaan. Para ahli yang berkidmat dengan wisata sebagai studi pedesaan diantaranya (Jones & Little, 2000; Murdoch & Abram, 1998). Pariwisata dipandang sebagai barang public yang bisa dinikmati secara bersama tanpa pengecualian. Dalam konteks ini menempatkan pariwisata sebagai aktivitas administrasi publik (Emerson et al., 2012; Howlett & Ramesh, 2014). Perkembangan selanjutnya pariwisata menjadi aktivitas yang kompleks dan dinamis, sehingga kolaborasi dipandang sebagai instrument terbaik untuk mengelola pariwisata. Tata kelola kolaboratif dapat membantu dalam pembuatan kebijakan partisipatif (Emerson et al., 2012; Zapata & Hall, 2012); mengatur actor Negara dan non negara yang efisien (Kismartini & Pujiyono, 2020; Keyim, 2016; Hall, 2011); dan manajemen bidang pariwisata sehingga tujuan pariwisata memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat melalui peran sosial, budaya, dan ekonomi bisa terwujud (Kismartini & Pujiyono, 2020). Pengembangan pariwisata di komunitas pedesaan dapat berkontribusi pada pendapatan lokal dan penciptaan lapangan kerja, fasilitas lokal dan pemeliharaan layanan, dan konservasi sumber daya budaya lokal (Howlett & Ramesh, 2014; Fredricsson dan Smas 2013; Hall et al., 2009; OECD, 2006; Saarinen, 2007).

Uraian di atas menjadi bukti empiris bahwa diperlukan kegiatan kolaborasi pariwisata yang adil dan efektif untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi di destinasi yang terletak di pedesaan (Keyim & Adamiak, 2014; Keyim, 2015; Keyim, 2016). Kontribusi sosial ekonomi pariwisata kepada masyarakat pedesaan dapat diungkapkan melalui promosi pembangunan berkelanjutan lokal karena mempromosikan pariwisata berkelanjutan, yang bertujuan untuk menyeimbangkan tiga dimensi keberlanjutan (ekonomi, sosial budaya, dan ekologis) di daerah tujuan dan masyarakat membutuhkan tata kelola kolaboratif yang disesuaikan dan efektif (Bramwell & Lane, 2011; Bramwell, 2011).

Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan berkait dengan satu sistem pengelolaan objek pariwisata yang memikirkan generasi selanjutnya. Tindakan yang bijak dalam mengeksplorasi potensi pariwisata tanpa harus mengeksploitasinya. Pariwisata berkelanjutan identik dengan efektifitas pengelolaan serta kehadiran kebijakan yang kuat untuk menjaga keberlanjutan bidang pariwisata. Dalam aksi konkretnya berupa kemampuan para stakeholder secara praktis mengidentifikasi kendala-kendala dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan (Pechlaner et al., 2010; Logar, 2010; Waligo et al., 2013; Yasarata et al., 2010; Farmaki, 2015).

Keberlanjutan bidang pariwisata dalam konteks penguatan kebijakan dapat ditelusur dari kajian tentang tata kelola pariwisata daerah (Dredge & Jamal, 2013; Wesley & Pforr, 2010; Zahra, 2011); hubungan tata kelola dengan keberlanjutan (Bramwell, 2011; Bramwell & Lane, 2011; Dinica, 2009); serta peran struktur pemerintahan dalam implementasi kebijakan (Kemp et al., 2005).

Persyaratan tambahan untuk mencapai tata kelola pembangunan (pariwisata) berkelanjutan mencakup keberadaan lembaga yang memfasilitasi pembangunan berkelanjutan, ketersediaan informasi dan pengetahuan yang berkualitas, koordinasi antarpemerintah dalam skala global lokal, koordinasi antar kebijakan di berbagai sektor selain pariwisata, pelaksanaan inovasi instrumen kebijakan, kualitas birokrasi yang efektif, budaya partisipatif dan kesepakatan tentang keberlanjutan serta penguatan modal sosial.

Dalam konteks Negara Indonesia, pariwisata berkelanjutan diartikan sebagai UU No 10/2009, menitik beratkan keberlanjutan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Jika ditelusuri materi yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia. Dengan demikian konsep keberlanjutan pada UU No 10/2009 sejalan dengan konsep *sustainable tourism*, bahwa keberlanjutan meliputi keberlanjutan terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.

Terkait dengan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan, geopark dikembangkan menjadi geowisata. Pengembangan geowisata dengan cara memanfaatkan sumber daya geologi yang ada di kawasan geopark (Gray, 2004). Mendefinisikan geowisata umumnya mencakup aspek geologi, faktor pendukungnya, dan keragaman hayati (Pariwisata, 2018; Newsome, 2006). Brahmantyo (2014) membagi komponen pembentuk geowisata terdiri dari tiga, yaitu bentuk geologi, proses pembentukan geologi, dan pariwisata. Merujuk pada beberapa aspek tersebut tergambar bahwa potensi dalam kawasan dapat dikembangkan menjadi geowisata yang menarik untuk diesklporasi oleh para wisatawan.

Kerangka konsep pembangunan berkelanjutan tentu saja mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Wujud pembangunan geowisata secara ekonomi tercermin pada hadirnya peluang ekonomi seiring adanya geowisata. Keberlanjutan lingkungan diwujudkan dalam upaya konservasi terhadap aneka ragam hayati yang tersedia di kawasan geopark. Keberlanjutan budaya tercermin dalam jumlah kesadaran masyarakat yang menjadi pelopor dalam menjaga, memelihara, dan melanjutkan pembangunan geowisata. Masyarakat menjadi bagian dalam keberlanjutan eksistensi geopark di Belitung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menggali fenomena dalam pengelolaan wisata geopark. Subyek penelitian ini lembaga pemerintah, swasta, dan komunitas yang terlibat dalam pengelolaan wisata geopark. Obyek penelitian berupa kolaborasi antar actor dalam mengelola wisata geopark. Fokus penelitian pada gambaran ecowisata geopark,

pengelolaan dan dinamika yang terjadi. Penelitian didukung data primer langsung dari narasumber dari unsur pemerintah, swasta, dan komunitas. Secara keseluruhan, 10 wawancara dilakukan dengan pemangku kepentingan dari berbagai kelompok termasuk pejabat Dinas Pariwisata Belitung (1), Badan Pengelola GeoPark Belitung (1), Bappeda Belitung (1), anggota sektor swasta (4), Lembaga Swadaya Masyarakat (1), Asosiasi Pariwisata (1) dan Akademisi (1). Pemilihan informan didasarkan pada pengalaman dan keterlibatan pada bidang pariwisata. Penentuan narasumber didasarkan pada konsep *mapping stakeholders*.

Dukungan data skunder dari berbagai sumber seperti media Massa, laporan penelitian, pemberitaan dan sebagainya. Penelitian dilakukan sebelum masa pandemic selama dua bulan (Nopember-Desember 2020) di Kabupaten Belitung. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dari Creswell 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wisata Geo Park Belitung

Secara histori, ditemukan bukti bahwa pengembangan daya tarik wisata berbasis geologi di Provinsi Bangka Belitung sudah dilakukan sejak tahun 2009. Kegiatan menyusun jalur geowisata dengan memanfaatkan lorong-lorong bekas pertambangan timah, proses pengolahan timah secara tradisional dan modern menjadi tema yang menarik. Berikutnya, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2012 merekomendasikan pengembangan geopark sebagai salah satu hasil Kajian Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan dan Desa Wisata Provinsi Bangka Belitung. Rekomendasi ini dilanjutkan dengan penyusunan jalur geowisata di lokasi *pilot*, Pulau Belitung. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Belitung yang disusun tahun 2014 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015, visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Belitung diarahkan pada terwujudnya Destinasi Geowisata yang Berdaya Saing Global, Beretika, dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Keseriusan menjadikan geowisata berbasis geologi di kawasan geopark ini menunjukkan komitmen pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk merawat keragaman geologi yang ada. Kesadaran dan rasa bangga memiliki destinasi wisata ini memberi harapan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Rasa kebanggaan masyarakat tumbuh menjadi budaya sehingga masyarakat merasa memiliki, memberi apresiasi yang tinggi, serta berkomitmen menjaga sumber daya geologi.

Kajian Geopark di Pulau Bangka dan Belitung merupakan upaya awal untuk menggali nilai penting keragaman geologi serta keterkaitannya dengan keanekaragaman hayati yang tumbuh dan berkembang dan kekayaan budaya masyarakat.

Kapabilitas menjadi elemen kunci karena terkait dengan kemampuan sebuah institusi (pemerintahan) dalam menyikapi kondisi lingkungan, potensi dan dinamikanya. Hal ini mengingat kapabilitas suatu institusi dapat menentukan apa yang mampu dilakukannya dan bagaimana hal tersebut bisa memberikan perubahan secara efektif dan progresif (Tece, 2018a). Amit & Schoemaker (1993) kapabilitas diartikan sebagai kapasitas berbagai sumber daya yang terintegrasi untuk melaksanakan kegiatan atau mencapai tujuan yang ditetapkan. Kapabilitas juga berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas manajemen (Edoho, 1998). Jadi kapabilitas yang akan dilihat yaitu sensitivitas suatu pemerintahan dalam melihat, menangkap, dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya.

Keberhasilan pengelolaan wisata GeoPark Belitung merupakan agregat dari seluruh aktivitas utama dan pendukung yang dilakukan oleh beragam actor. Rangkaian aktivitas tersebut secara fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, aktuasi, serta monitoring dan evaluasinya. Informan Bappeda Belitung memberikan informasi tentang penyiapan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas terkait wisata GeoPark. Penyiapan ini sebagai wujud konkret pembangunan pariwisata.

Informasi di atas menggambarkan bahwa, kegiatan perencanaan strategic dilakukan oleh pemerintah Province Bangka Belitung. Dalam perencanaan makro, dilakukan transformasi dari sector pertambangan ke sector pariwisata dan kelautan. Dukungan secara geografis sangat baik, karena wilayah ini memiliki hamparan pantai yang indah, jangkauan akses dari pulau Jawa dan Negara Asian, serta keberadaan penduduk yang memiliki pluralitas sejak dahulu. Modal dukungan ini memberikan optimism dalam jangka panjang, GeoPark Bangka Belitung ini akan mendapat pengakuan dari UNESCO.

Informasi senada disampaikan oleh Ketua Umum Badan Pengelola Geopark Belitung Yuspian, bahwa penetapan geosite ini merupakan satu di antara upaya BP Geopark Belitung merespon rekomendasi hasil asesmen. Serta sebagai hasil sidang dewan UNESCO Global Geopark pada Desember 2020 yang mensyaratkan agar ditetapkan setidaknya 20 geosite di kawasan Geopark Belitung (tribunnews, 2021).

Pengelolaan Gaopark yang baik merupakan *platform* yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional dan daerah. Geopark dapat berkontribusi paling tidak dalam mencapai 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu peningkatan kualitas pendidikan (SDG-4), kesetaraan gender (SDG-5), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG-8), pembangunan masyarakat dan kota berkelanjutan (SDG-11), produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab (SDG-12), serta kemitraan (SDG-17).

Pengelolaan GeoPark berkontribusi untuk mencapai tujuan mengurangi angka kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.

Informan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung menyatakan dan menegaskan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia memberikan dampak positif pariwisata bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di destinasi. Pengelola destinasi di Indonesia secara umum masih perlu memahami betul prinsip-prinsip berkelanjutan dalam kegiatan wisata yang digeluti, khususnya dalam hal tata kelola destinasi, manfaat ekonomi bagi masyarakat, hingga pelestarian budaya dan lingkungan.

Dalam rangka mengaktualisasi berbagai actor yang berkontribusi dalam pengelolaan wisata GeoPark Belitung berawal dari sinergisitas. Sinergisitas antarlembaga dalam rangka pengelolaan pariwisata GeoPark dilakukan oleh pemerintah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan sosialisasi tentang sinergisitas Pembangunan GeoPark Belitung.

Sinergisitas antarlembaga ini melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan komunitas kegiatan sinergisitas ini diikuti oleh pengelola Daya Tarik Wisata yang ada di Pulau Belitung, Perwakilan Badan Pengelola Geopark Pulau Belitung, Asita, IHGMA, ASPPI, ASITA, PHRI,

HPI Kabupaten Belitung. Integrasi peran aktor dalam pembangunan geowisata Belitung, dilanjutkan dengan materi penguatan peran budaya dalam mendukung pembangunan geowisata Belitung.

Salah satu upaya konkrit, meningkatkan kapabilitas *think across*, Badan Pengelola GeoPark mengundang pelaku langsung pengelolaan geowisata berbasis masyarakat. Berbagi pengalaman ini sangat penting dimiliki oleh pengelola, untuk melakukan tinjauan secara lintas instansi, wilayah, dan bahkan Negara untuk melakukan komparasi serta belajar tentang pengelolaan geowisata yang baik. Sejumlah paparan *success story* pengelolaan geowisata berbasis masyarakat disampaikan oleh pengelola Bukit Pramun, Adong, pengelola Aik Rusak, Iswandi, dan pengelola Tebat Rasau, Nasidi.

Partisipasi ini, secara khusus, ditujukan untuk pemuda-pemudi sebagai *agent of change* dalam masyarakat. Mereka diharapkan dapat bekerja sama sebagai kolaborator dengan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta menjadi inovator dalam mengeluarkan inovasi pengembangan sumber daya yang ada di daerahnya.

Tema tentang sinergi antarlembaga terkait dengan kapabilitas berpikir lintas (*thinking across*) dalam teori kapabilitas dinamik. Menurut Neo dan Chen (2007) kapabilitas berpikir lintas (*thinking across*) adalah kemampuan suatu institusi untuk keluar dari zona tradisional dan batasan-batasan yang ada, dan belajar dari pengalaman pihak lain yang memiliki ide atau aturan dan atau praktik-praktiknya yang baik, yang mungkin dapat diadopsi atau dipelajari serta disesuaikan menurut kebutuhan unik atau khusus dalam tujuannya mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Tabel 1. Elaborasi Ringkasan Peran Aktor

No	Kelompok Organisasi	Peran dan Otoritas	Kepemilikan Kekuatan, Kepentingan, dan Pengaruh
1.	Badan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> a. menjaga kelestarian pariwisata GeoPark Belitung dalam rangka kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya serta keberlanjutan b. melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian terkait objek wisata GeoPark Belitung c. pemberdayaan struktur dan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan lokal 	Lembaga pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Memiliki kekuatan (power), kepentingan (interest), dan pengaruh (influence) yang besar dalam mengelola kawasan wisata GeoPark Belitung
2	Peran Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. menjaga kelestarian pariwisata Belitung b. melaksanakan kegiatan edukasi dan advokasi dalam pengelolaan wisata GeoPark Belitung c. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat 	Secara umum komunitas memiliki kepentingan yang besar dalam pengelolaan pariwisata, namun dalam hal kekuasaan dan pengaruh relatif kecil kepemilikannya.

3. Badan Usaha	<p>a. Berperan secara aktif dalam menjaga keindahan lingkungan pariwisata GeoPark Belitung dalam bentuk pembiayaan, pemeliharaan dan konservasi,serta pemberdayaan masyarakat penyangga yang telah direncanakan oleh pemerintah baik pusat, provinsi, maupun daerah</p> <p>b. Melaksanakan pengelolaan pariwisata GeoPark sesuai dengan bidang tugas dan peruntukannya.</p>	Eksistensi Badan Usaha dalam pengelolaan pariwisata GeoPark Belitung cukup besar. Badan usaha yang mencakup para pengusaha bidang tourism memiliki power, interest, dan influence.
----------------	---	--

Sumber : Analisis Peneliti, 2021

Uraian di atas menggambarkan bahwa secara elaborative berbagai actor yang terlibat dalam pengelolaan GeoPark memiliki peran dan otoritas. Selain itu, para actor juga memiliki kekuatan, kepentingan, dan pengaruh. Walaupun secara kapasitas organisasi berbeda, tetapi disatukan oleh visi dan misi yang sama untuk mewujudkan GeoPark Belitung yang mendunia, maka para actor berhasil melakukan sinergisitas. Sinergisitas yang dilakukan berhasil membangun kolaborasi yang baik sehingga GeoPark berhasil diakui oleh UNESCO sebagai asset dunia internasional yang wajib dipelihara dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan edukasi dan pariwisata.

Untuk mewujudkan konsep tersebut, aspek lingkungan juga perlu dijaga. Pelibatan pemangku kepentingan melalui perencanaan kolaboratif dan komprehensif dalam pengembangan destinasi wisata GeoPark di Kabupaten Belitung merupakan syarat yang tidak dapat ditawar lagi dalam menciptakan kawasan pesisir dan laut yang berkelanjutan dengan memperkuat pemahaman bahwa masyarakat lokal masyarakatnya masih sangat bergantung pada wilayah pesisir.

PENUTUP

Pengakuan GeoPark Belitung oleh UNESCO merupakan konkritisasi pengelolaan wisata yang berhasil. Keberhasilan tersebut merupakan agregat aktivitas berprinsip manajemen dan dilakukan oleh berbagai actor baik pemerintah, swasta, dan komunitas. Potensi wisata GeoPark Belitung diinterpretasi sebagai kebutuhan bersama untuk menyongsong kesejahteraan masyarakat melalui kreatifitas budaya yang bernilai ekonomi bagi pengunjung destinasi.

Berbagai actor berkolaborasi bermodalkan kapabilitas dinamik. Kapabilitas dinamik ini terjadi pada kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta sinergisitas / kolaborasi multi aktor yang menjadi basis pengelolaan. Ketiga kegiatan yang menggambarkan kapabilitas dinamik tersebut merujuk pada konsep dinamik governansi dan kemampuan personal yang merupakan sintesa dari konsep Neo & Chen dan Teece. Stakeholder pariwisata menunjukkan kemampuan yang agile dan berproses serta mendasarkan pada daya pikir *think again, think ahead* dan *think across*.

DAFTAR PUSTAKA

Amit, R., & Schoemaker, P. J. H. (1993). Strategic asset and organisational rent. *Strategic Management Journal*. <https://doi.org/10.1002/smj.4250140105>

- Bramwell, B. (2011). Governance, the state and sustainable tourism: A political economy approach. In *Journal of Sustainable Tourism* (Vol. 19, Issues 4–5, pp. 459–477). <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.576765>
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. In *Journal of Sustainable Tourism* (Vol. 19, Issues 4–5, pp. 411–421). <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- De Araujo, L. M., & Bramwell, B. (2002). Partnership and regional tourism in Brazil. *Annals of Tourism Research*, 29(4), 38–64. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(02\)00033-6](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(02)00033-6)
- Dinica, V. (2009). Governance for sustainable tourism: A comparison of international and Dutch visions. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(5), 583–603. <https://doi.org/10.1080/09669580902855836>
- Dredge, D., & Jamal, T. (2013). Mobilities on the Gold Coast, Australia: Implications for destination governance and sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 21(4), 557–579. <https://doi.org/10.1080/09669582.2013.776064>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Farmaki, Anna. (2015). Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, and Environment, 17:3,385-407. <https://doi.org/10.1080/14616688.2015.1036915>
- Fredricsson, K., and L. Smas. 2013. "Small-Scale Tourism in Rural Areas: Trends and Research in the Nordic Countries. Nordic Working Group 1B: Future Rural Areas." Working Paper 3. Stockholm: Nordregio.
- Jones, O., & Little, J. (2000). Rural challenge(s): Partnership and new rural governance. In *Journal of Rural Studies* (Vol. 16, Issue 2, pp. 171–183). [https://doi.org/10.1016/S0743-0167\(99\)00058-3](https://doi.org/10.1016/S0743-0167(99)00058-3)
- Kemp, R., Parto, S., & Gibson, R. B. (2005). Governance for sustainable development: Moving from theory to practice. *International Journal of Sustainable Development*, 8(1), 12–30. <https://doi.org/10.1504/IJSD.2005.007372>
- Keyim, P. (2015). Collaboration and rural development in a tourism context. In *Tourism Development* (Issue October).
- Keyim, Parhad. (2012). Government Roles in Rural Tourism Development: A Case from Turpan. *Tourism Today*, 12, 113–133.
- Keyim, Parhad. (2016). Tourism and rural development in western China: A case from Turpan. *Community Development Journal*, 51(4), 534–551. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsv046>
- Keyim, Parhad, & Adamiak, C. (2014). Entrepreneurs' Perspectives towards Tourism and Rural Development in North Karelia, Finland. *Tourism Today*, 14, 91–102.
- Kismartini, K., & Pujiyono, B. (2020). Collaborative management model tanjung lesung tourism in Pandeglang District, Banten Province, Indonesia. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 30(2), 868–874. <https://doi.org/10.30892/gtg.302spl12-516>
- Logar, I. (2010). Sustainable tourism management in Crkvenica, Croatia: An assessment of policy instruments. *Tourism Management*, 31, 125–135. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.02.005>

- Michael Hall, C. (2011). A typology of governance and its implications for tourism policy analysis. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 437–457. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.570346>
- Murdoch, J., & Abram, S. (1998). Defining the limits of community governance. *Journal of Rural Studies*, 14(1), 41–50. [https://doi.org/10.1016/s0743-0167\(97\)00046-6](https://doi.org/10.1016/s0743-0167(97)00046-6)
- OECD. 2006. *The New Rural Paradigm: Policies and Governance*. Paris: Economic Cooperation and Development.
- Pechlaner, H., Ruhanen, L., Scott, N., Ritchie, B., & Tkaczynski, A. (2010). Governance: a review and synthesis of the literature. In *Tourism Review* (Vol. 65, Issue 4, p. 416). <https://doi.org/10.1108/16605371011093836>
- Saarinen, J. (2007). Contradictions of rural tourism initiatives in rural development contexts: Finnish rural tourism strategy case study. In *Current Issues in Tourism* (Vol. 10, Issue 1, pp. 96–105). <https://doi.org/10.2167/cit287.0>
- Teece, D. J. (2018a). Dynamic capabilities as (workable) management systems theory. *Journal of Management and Organization*, 24 (3), 359-368. <https://doi.org/10.1017/jmo.2017.75>
- Waligo, V.M., Clarke, J., & Hawkins, R. (2013). Implementing sustainable tourism: A multi-stakeholder involvement management framework. *Tourism Management*, 36, 342-353. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.10.008>
- Wesley, A., & Pforr, C. (2010). The governance of coastal tourism: Unravelling the layers of complexity at Smiths Beach, Western Australia. *Journal of Sustainable Tourism*, 18(6), 773-792. <https://doi.org/10.1080/09669581003721273>
- Zahra, A. L. (2011). Rethinking regional tourism governance: The principle of subsidiarity. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(45), 535-552. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.576764>
- Zapata, M. J., & Hall, C. M. (2012). Public-private collaboration in the tourism sector: Balancing legitimacy and effectiveness in local tourism partnerships. The Spanish case. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 4(1), 61–83. <https://doi.org/10.1080/19407963.2011.634069>